



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3521782
LAMAM www.kkp.go.id SUREL djpt@kkp.go.id

Nomor : B.1657/DJPT.2/TU.330/VI/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : Dua Halaman
Hal : Undangan Rapat

17 Juni 2025

Yth. (Daftar Terlampir)

Dalam rangka mendukung penataan rumpon di Indonesia, bersama ini kami mengundang Bapak/Ibu/Saudara untuk dapat hadir pada pertemuan penyusunan rencana pendaftaran mandiri rumpon eksisting di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) yang akan diselenggarakan pada:

hari, tanggal : Rabu - Kamis, 18 - 19 Juni 2025
waktu : 09.00 WIB – selesai
tempat : Kopi Tugoh Signature
Jl. Raya Pajajaran No. 2 RT.02/RW. 04, Babakan,
Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat
16128
acara : Rapat Koordinasi Dalam Rangka Penataan Rumpon di
WPPNRI, dengan fokus:
a. Identifikasi pola petunjuk teknis/pelaksanaan
b. Penyusunan pola petunjuk teknis/pelaksanaan
pendaftaran mandiri rumpon eksisting
c. Hal lain yang berkembang dalam rapat

Adapun biaya transportasi dan uang harian untuk peserta lingkup pemerintah ditanggung oleh Yayasan Masyarakat dan Perikanan Indonesia (MDPI). Konfirmasi Kehadiran dan informasi dapat menghubungi narahubung Sdri Wulan (0853-7535-2792).

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

a.n. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap
Direktur Pengelolaan Sumber Daya Ikan,



Ditandatangani
Secara Elektronik

Syahril Abd Raup

Tembusan:
Direktur Jenderal Perikanan Tangkap

Lampiran Surat

Nomor : B.1657/DJPT.2/TU.330/VI/2025

Tanggal : 17 Juni 2025

DAFTAR NAMA PEJABAT YANG DIUNDANG

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (1 Orang)
2. Kepala Biro Hukum, Setjen KKP (1 Orang)
3. Direktur Kepelabuhanan Perikanan, DJPT (1 Orang)
4. Direktur Usaha Penangkapan Ikan, DJPT (1 Orang)
5. Direktur Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan, DJPT (1 Orang)
6. Ketua Tim Kerja Permesinan dan Operasional Kapal Perikanan, Dit KAPI, DJPT (1 Orang)
7. Ketua Tim Kerja Alat Penangkapan Ikan, Dit. KAPI, DJPT (1 Orang)
8. Ketua Tim Kerja Digitalisasi dan Integrasi Sistem Usaha Penangkapan Ikan dan Tata Kelola Pemunggutan PNBSP SDA Perikanan, Dit. UPI, DJPT (1 Orang)
9. Ketua Tim Kerja Harmonisasi dan Pembinaan Perizinan Penangkapan Ikan Kewenangan Pusat dan Daerah Serta Fasilitasi Perizinan Penangkapan Ikan Untuk Nelayan Kecil, Dit. UPI, DJPT (1 Orang)
10. Ketua Tim Kerja Hukum, Sesditjen PT, DJPT (1 Orang)
11. Ketua Tim Kerja Pengelolaan SDI ZEEI dan Laut Lepas, Dit. PSDI, DJPT (1 Orang)
12. Ketua Tim Kerja Logbook dan Alokasi Kuota, Dit. PSDI, DJPT (1 Orang)
13. Thomas Budiarto, ST, Dit. KP, DJPT (1 Orang)
14. Hary Christijanto, A.Pi., M.Sc, Ahli Madya P3T, Dit. PSDI, DJPT (1 Orang)
15. Riana Handayani, S.Pi, Ahli Muda P3T, Dit. PSDI, DJPT (1 Orang)
16. Mumpuni Cyntia Pratiwi, S.Pi., M.S., Ahli Muda P3T, Dit. PSDI, DJPT (1 Orang)
17. Saraswati, S.Pi, Ahli Pertama P3T, Dit. PSDI, DJPT (1 Orang)
18. Neneng, Pengelola Data, Dit. PSDI, DJPT (1 Orang)
19. Virda Wulandari, S.Pi, Ahli Pertama P3T, Dit. PSDI, DJPT (1 Orang)
20. Yayasan Masyarakat dan Perikanan Indonesia (MDPI) (3 Orang)

a.n. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap
Direktur Pengelolaan Sumber Daya Ikan,



Ditandatangani
Secara Elektronik

Syahril Abd Raup

Lampiran Surat

Nomor : B.1657/DJPT.2/TU.330/VI/2025

Tanggal : 17 Juni 2025

AGENDA
RAPAT KOORDINASI DALAM RANGKA PENATAAN RUMPON EKSISTING DI
WPPNRI
18-19 JUNI 2025

WAKTU	KEGIATAN	NARASUMBER
Rabu, 18 Juni 2025		
09.00 – 09.45	Pengantar Rapat Koordinasi Dalam Rangka Penataan Rumpon di WPPNRI	Ketua Tim Kerja Pengelolaan SDI ZEEI dan Laut Lepas
09.45 – 10.05	Pola Petunjuk Teknis/Pelaksanaan Terkait Migrasi Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan dan Perizinan Berusaha Subsektor Pengangkut Ikan	Dit. UPI
10.05 – 10.25	Pola Petunjuk Teknis/Pelaksanaan Terkait Bantuan Penangkapan Ikan	Dit. KAPI
10.25 – 10.45	Pola Petunjuk Teknis/Pelaksanaan Terkait Mekanisme Penetapan Nelayan dan Pembagian Kuota Penangkapan Benih Bening Lobster (<i>pueruls</i>) oleh Provinsi Kepada Nelayan	Ketua Tim Kerja Logbook dan Alokasi Kuota, Dit. PSDI, DJPT
10.45 - 12.00	Diskusi	Seluruh Peserta
12.00 – 13.15	ISHOMA	Seluruh Peserta
13.15 – 15.15	Penyusunan Petunjuk Teknis Pendaftaran Mandiri Rumpon Eksisting	Seluruh Peserta
15.15 – 15.45	Istirahat dan Sholat	Seluruh Peserta
15.45 – 17.00	Lanjutan Penyusunan Petunjuk Teknis Pendaftaran Mandiri Rumpon Eksisting	Seluruh Peserta
Kamis, 19 Juni 2025		
09.00 – 12.00	Lanjutan Penyusunan Petunjuk Teknis Pendaftaran Mandiri Rumpon Eksisting	Seluruh Peserta
12.00 – 13.15	ISHOMA	Seluruh Peserta
13.15 – 15.15	Penyusunan Draf Rancangan Ketentuan Pendaftaran Mandiri Rumpon Eksisting	Seluruh Peserta
15.15 – 15.45	Istirahat dan Sholat	Seluruh Peserta
15.45 – 17.00	Kompilasi Hasil dan Penutupan	Seluruh Peserta

**Hasil Pertemuan
Rapat Koordinasi Penataan Rumpon Melalui Penyusunan Rencana Peaporan
Mandiri Rumpon Eksisting di WPPNRI**



Kolaborasi



Kopi Tugoh - Bogor , 18-19 Juni 2025

Daftar Isi

Latar Belakang.....	3
Tujuan.....	3
Waktu dan Tempat Pelaksanaan.....	3
Agenda kegiatan.....	4
Hasil Pertemuan.....	5
Ringkasan Peserta.....	5
Pemaparan Materi.....	5
Tantangan.....	10
Rencana Tindak Lanjut.....	11
Lampiran.....	12

Latar Belakang

Rapat koordinasi tentang penataan rumpon dan penyusunan rencana pelaporan mandiri rumpon eksisting di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) telah dilaksanakan pada 18-19 Juni 2025 di Bogor, Jawa Barat. Pertemuan ini dihadiri oleh 18 peserta, termasuk dua narasumber daring.

Direktur PSDI menyampaikan arahan penting terkait penataan rumpon, Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL), dan Surat Izin Penangkapan Rumpon (SIPR). Masalah utama yang teridentifikasi adalah ketidaksesuaian antara regulasi yang berlaku dengan kondisi pemasangan rumpon di lapangan, serta jumlah rumpon eksisting yang melebihi batas yang ditetapkan. Sebagai solusi jangka pendek, penataan posisi dan jumlah rumpon akan ditunda atau diabaikan sementara dari aturan yang berlaku. Tujuannya adalah agar rumpon dapat terkendali dan meningkatkan penerimaan negara. Strategi yang ditekankan adalah "Data dulu, baru tata", yang akan diawali dengan inventarisasi semua rumpon yang ada. Prioritas lain adalah mencari cara agar penerbitan PKKPRL tidak memakan waktu lama dan tidak menyulitkan pelaku usaha, serta menyepakati syarat yang paling mudah bagi nelayan.

Rapat ini diselenggarakan sebagai tindak lanjut atas banyaknya kendala dalam pendaftaran rumpon yang telah teridentifikasi melalui pertemuan forum rumpon pada tanggal 4 Juni 2025. Menteri Kelautan dan Perikanan, melalui Staf Khususnya, telah menginstruksikan agar Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) dan Petunjuk Teknis (Juknis) terkait percepatan perizinan rumpon—baik untuk rumpon eksisting maupun rumpon baru—harus tuntas dalam waktu dua bulan. Oleh karena itu, rapat kali ini lebih berkonsentrasi pada penyusunan Juknis dan Juklak perizinan rumpon di lingkungan DJPT, khususnya untuk pelaporan mandiri rumpon eksisting.

Tujuan

Rapat Koordinasi Dalam Rangka Penataan Rumpon di WPPNRI, dengan fokus:

1. Identifikasi pola petunjuk teknis/pelaksanaan
2. Penyusunan pola petunjuk teknis/pelaksanaan pendaftaran mandiri rumpon eksisting

Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Lokasi Kegiatan : Kopi Tugoh Signature, Jl. Raya Pajajaran No. 2 RT.02/RW. 04,
Babakan, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat
Waktu Kegiatan : 18-19 Juni 2025

Agenda kegiatan

WAKTU	KEGIATAN	NARASUMBER
Rabu, 18 Juni 2025		
09.45 - 10.05	Pengantar Rapat Koordinasi Dalam Rangka Penataan Rumpon di WPPNRI	Ketua Tim Kerja Pengelolaan SDI ZEEI dan Laut Lepas
10.05 - 10.25	Pola Petunjuk Teknis/Pelaksanaan Terkait Bantuan Penangkapan Ikan	Dit. KAPI
10.25 - 10.45	Pola Petunjuk Teknis/Pelaksanaan Terkait Mekanisme Penetapan Nelayan dan Pembagian Kuota Penangkapan Benih Bening Lobster (pueruls) oleh Provinsi Kepada Nelayan	Ketua Tim Kerja Logbook dan Alokasi Kuota, Dit. PSDI, DJPT
10.45 - 12.00	Diskusi	Seluruh Peserta
12.00 - 13.15	ISHOMA	Seluruh Peserta
13.15 - 15.15	Penyusunan Petunjuk Teknis Pendaftaran Mandiri Rumpon Eksisting	Seluruh Peserta
15.15 - 15.45	Istirahat dan Sholat	Seluruh Peserta
15.45 - 17.00	Lanjutan Penyusunan Petunjuk Teknis Pendaftaran Mandiri Rumpon Eksisting	Seluruh Peserta
Kamis, 19 Juni 2025		
09.00 - 12.00	Lanjutan Penyusunan Petunjuk Teknis Pendaftaran Mandiri Rumpon Eksisting	Seluruh Peserta
12.00 - 13.15	ISHOMA	Seluruh Peserta
13.15 - 15.15	Penyusunan Draf Rancangan Ketentuan Pendaftaran Mandiri Rumpon Eksisting	Seluruh Peserta
15.15 - 15.45	Istirahat dan Sholat	Seluruh Peserta
15.45 - 17.00	Kompilasi Hasil dan Penutupan	Seluruh Peserta

Hasil Pertemuan

Ringkasan Peserta

Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan ini adalah 16 orang, dua orang sebagai nara sumber disampaikan secara daring melalui zoom inline. Detail peserta ada pada lampiran dan ringkasan peserta adalah sebagai berikut :

Jenis	Laki-laki	Perempuan
Peserta	6	10
Hadirin	2 melalui online	0
Total	8	10

Pemaparan Materi

Arahan Direktur PSDI: Penataan Rumpon, PKKPRL, dan SIPR

- Direktur PSDI menyampaikan arahan penting terkait penataan rumpon, Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL), dan Surat Izin Penangkapan Rumpon (SIPR), melanjutkan pembahasan rapat sebelumnya pada 6 Juni dan mengucapkan terima kasih kepada MDPI atas terselenggaranya rapat ini.
- Penataan Rumpon : Masalah utama yang teridentifikasi adalah ketidaksesuaian antara aturan yang ada dengan kondisi pemasangan rumpon di lapangan, serta jumlah rumpon eksisting yang tidak cocok dengan jumlah yang diatur.
- Sebagai solusi jangka pendek, : pelaksanaan penataan terkait posisi dan jumlah rumpon akan ditunda atau diabaikan sementara dari aturan yang berlaku. Tujuannya adalah agar rumpon di lapangan dapat dikendalikan dan optimal dalam meningkatkan penerimaan negara.
- Strategi penataan yang ditekankan adalah "Data dulu, baru tata." Proses ini akan diawali dengan mendata semua rumpon yang ada saat ini. Kemudian, izin sementara akan diberikan kepada rumpon yang sudah teridentifikasi lokasinya, bahkan jika berada di daerah konservasi. Akan ada formulir isian untuk kapal-kapal pengguna rumpon, termasuk identitas pemilik dan kapal yang menggunakannya. Hasil riset dari Unpatti terkait rumpon 2 mil juga akan diakomodasi sementara, meskipun riset lebih lanjut mungkin diperlukan di masa depan. Direktur PSDI menekankan pentingnya membuat pengecualian di awal agar proses penataan dapat dimulai, karena terlalu idealis dengan aturan awal akan menghambat pelaksanaannya.
- PKKPRL dan SIPR adalah poin penting yang harus segera dibahas. Prioritasnya adalah mencari cara agar penerbitan PKKPRL tidak memakan waktu lama dan tidak menyulitkan pelaku usaha. Perlu disepakati syarat-syarat yang paling mudah agar nelayan dapat mengurusnya dengan gampang.
- Konsep Penataan Ulang Rumpon
Secara keseluruhan, konsep penataan ulang yang ditekankan adalah sebagai berikut: Data semua rumpon yang ada (dengan menyiapkan petunjuk pelaksanaan pendataan) → Beri Izin Semua → Evaluasi → Atur Ulang (Revisi Aturan).

Putuh Swadela : Pengantar Kegiatan

Dalam rangka mempercepat perizinan rumpon, rapat ini digelar sebagai tindak lanjut atas banyaknya kendala pendaftaran yang ditemui. Bapak Menteri, melalui Staf Khususnya, telah menginstruksikan agar Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) dan Petunjuk Teknis (Juknis) terkait percepatan perizinan rumpon ini harus tuntas dalam waktu dua bulan, mencakup baik rumpon yang sudah ada (existing) maupun rumpon baru. Fokus utama dari instruksi ini adalah menyelesaikan masalah pendaftaran rumpon yang telah diinventarisasi oleh MDPI dan keluhan dari para pelaku usaha. Oleh karena itu, rapat kali ini lebih berfokus pada penyusunan Juknis dan Juklak perizinan rumpon di lingkungan DJPT terutama untuk pelaporan mandiri rumpon existing. Setelah draf ini disetujui di lingkup internal, pembahasan akan dilanjutkan dengan Direktorat Jenderal lain dan Bapak Abdi. Untuk mencapai target tersebut, kami sangat mengharapkan masukan dari semua pihak hari ini, khususnya dari tim perizinan dan KAPI, guna menyempurnakan draf yang sudah ada. Untuk itu dalam penyusunan juknis pelaporan mandiri, tim kerja ZEE dan laut lepas perlu mencontoh keberhasilan tim kerja kuota dan logbook serta dit. KAPI dalam menyusun juknis atau juklat. Dari juklat tersebut bisa dicontoh struktur dan pokok-pokok bahasan yang akan dituangkan dalam juknis pelaporan mandiri ini. Persyaratan rumpon yang dianggap masih sulit diimplementasikan adalah KKPRL. Masih perlu juga dibahas penyederhanaanya di internal KKP.

Ibu Lingga Dit. KAPI : Petunjuk Teknis Pendaftaran Mekanisme Bantuan Alat Penangkap Ikan (API)

- Program Bantuan Alat Penangkap Ikan (API) dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dirancang untuk mendukung keberlanjutan usaha nelayan kecil di Indonesia. Bantuan ini diberikan dalam bentuk barang seperti jaring insang, bubu, pancing ulur, dan lainnya, serta dapat diajukan oleh nelayan perorangan, kelompok nelayan, koperasi, atau Kelompok Usaha Bersama (KUB). Persyaratan utamanya meliputi kepemilikan Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan (KUSUKA) dan memiliki kapal berukuran maksimal 5 GT, serta kesediaan untuk memelihara alat yang diberikan.
- Proses pengajuan bantuan ini dimulai dengan permohonan, yang kemudian dilanjutkan dengan seleksi penerima, pengadaan, distribusi alat, dan pendampingan pengelolaan. Keterlibatan berbagai pihak, mulai dari KKP, dinas kelautan dan perikanan daerah, hingga Penyuluh Perikanan, sangat penting dalam sosialisasi, pengusulan, dan pemantauan program. Peran penyuluh sangat krusial sebagai ujung tombak yang membantu sosialisasi dan pendampingan di lapangan.
- Bantuan API ini disalurkan oleh Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap dalam bentuk alat penangkapan ikan terakit atau komponennya, disesuaikan dengan kebutuhan nelayan. Untuk tahun anggaran 2025, formulir pengajuan bantuan API telah tersedia, menunjukkan komitmen KKP untuk menyalurkan bantuan secara tepat waktu dan berkelanjutan guna mendukung produktivitas nelayan kecil.
- Sebagai catatan bahwa Petunjuk Teknis yang dipresentasikan oleh KAPI, akan menjadi bagian sample/ccontoh bagi SDI (Pak Hary dan Team) dalam Menyusun Juknis Rumpon.
- Detail materi ada dalam lampiran

**Materi dari Aris Budiarto - Ketua Tim Kerja Logbook dan Alokasi Kuota, Dit. PSDI, DJPT :
Pola Petunjuk Teknis/Pelaksanaan Terkait Mekanisme Penetapan Nelayan dan Pembagian
Kuota Penangkapan Benih Bening Lobster (*pueruls*) oleh Provinsi Kepada Nelayan**

- Pengelolaan Benih Bening Lobster (BBL) diatur melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7 Tahun 2024. Hanya nelayan kecil terdaftar dalam kelompok nelayan yang diizinkan menangkap BBL, dengan kewajiban memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dan melaporkan hasil tangkapan. Proses ini didukung oleh Sistem Informasi Pengelolaan Lobster, Kepiting, dan Rajungan (SILOKER), yang mengelola penetapan kelompok nelayan, pembagian kuota, penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA), dan pendataan hasil tangkapan BBL.
- Mekanisme penetapan kuota melibatkan pengajuan usulan oleh ketua kelompok nelayan kepada Dinas Provinsi, yang kemudian melakukan verifikasi. Jika verifikasi berhasil, Dinas Provinsi akan membagi kuota BBL per kelompok nelayan. Apabila dalam tiga hari tidak ada penetapan atau penolakan, SILOKER secara otomatis akan menetapkan kelompok nelayan dan kuota. Total kuota BBL nasional adalah 419.213.719 ekor, yang distribusinya dirinci per provinsi dan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI).
- Penerbitan SKA, yang juga melalui SILOKER, memerlukan verifikasi lapangan terhadap jumlah dan jenis BBL, memastikan tidak melebihi kuota yang dimiliki kelompok nelayan dan sesuai peruntukan. Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota/UPT PT memiliki waktu paling lambat satu hari kerja untuk menerbitkan SKA setelah pengajuan diterima dan diverifikasi. Hingga 31 Desember 2024, dari total kuota yang didistribusikan secara nasional sebesar 95.229.157 ekor, realisasi SKA tercatat 25.409.658 ekor.
- Detail materi ada dalam lampiran

Diskusi Peyusunan Petunjuk Teknis Pendaftaran Mandiri Rumpon Eksisting Yang dipandu oleh Hary Christianto

Adapun hasil diskusi yang disepakati adalah sebagai berikut

- Pelaporan mandiri rumpon adalah inisiatif penting yang bertujuan untuk menata dan mengelola rumpon di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI). Secara spesifik, tujuannya meliputi:
 - Mengidentifikasi rumpon yang sudah ada.
 - Menyiapkan kebijakan tata kelola rumpon.
 - Meningkatkan jumlah rumpon berizin.
 - Mengembangkan sistem informasi rumpon nasional.
- Proses ini akan menjadi dasar bagi tata kelola rumpon selanjutnya dan tindak lanjut perizinan, termasuk perizinan amnesti. **Pelaksanaannya direncanakan pada Agustus-Oktober 2025.**
- Pedoman teknis (Juknis) pelaporan mandiri rumpon akan memiliki kerangka sebagai berikut:
 - Pendahuluan: Mencakup latar belakang, tujuan, dan pengertian.
 - Tata Pendaftaran dan Pemanfaatan Data: Menjelaskan sasaran, pelaku usaha, informasi yang wajib ada, tugas instansi terkait, pembentukan basis data rumpon nasional, dan tindak lanjut perizinan.

- Lampiran: Berisi contoh form elektronik pendaftaran, form elektronik tanda terima, dan contoh bukti data dukung yang dilampirkan.
- Sasaran pelaporan mandiri ini adalah semua rumpon yang sudah ada, baik yang dipasang oleh pelaku usaha perikanan maupun non-perikanan.
 - Pelaku Usaha Perikanan: Termasuk pemegang SIUP Pusat dan nelayan kecil yang memiliki kapal dan telah menempatkan/memanfaatkan rumpon. Mereka perlu menunjukkan bukti-bukti seperti dokumen kapal (SIUP/NIB/KTP, SIPI/TDKP/E-BKP) dan akan menjadi prioritas utama dalam perizinan ke depan.
 - Usaha Non-Penangkapan Ikan (Pemodal atau Pengusaha Rumpon): Wajib melaporkan rumponnya meskipun tata cara perizinannya akan dibahas lebih lanjut.
 - Nelayan Kecil tanpa Dokumen Verifikasi (Pas Kecil atau BKP): Dapat mendaftar melalui kategori non-penangkapan ikan.
- Hal-hal yang wajib dilaporkan dalam pelaporan mandiri ini meliputi: titik koordinat rumpon, Jumlah rumpon, Karakteristik dan bahan rumpon, Dokumen kapal atau identitas penduduk.
- Semua pelaporan mandiri akan berbasis online melalui aplikasi SILAT (Sistem Informasi Izin Layanan Cepat).
 - Pelaku Usaha Perikanan Pusat: Yang sudah memiliki akun dapat langsung login.
 - Pelaku Rumpon Non-Perikanan, Nelayan Kecil, atau Izin Daerah: Akan disediakan menu input data khusus.
- Setelah pelaporan berhasil, akan ada notifikasi keberhasilan yang akan masuk melalui tautan Google Drive (GD) yang disediakan oleh pemohon. Bukti dukung yang diperlukan adalah salinan SIUP/NIB/KTP, SIPI/TDKP/E-BKP, dan opsional foto rumpon dengan titik koordinat.
- Hasil pelaporan mandiri ini akan menjadi data nasional yang akan digunakan untuk tata kelola rumpon selanjutnya, pengembangan sistem informasi, dan rekomendasi tata kelola, serta menjadi proses lanjutan untuk perizinan amnesti.
 - Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT): Bertanggung jawab menyediakan laman elektronik, petunjuk, diseminasi, serta memantau dan mengevaluasi kemajuan pendaftaran.
 - Pemerintah Daerah dan Asosiasi/Mitra Pemerintah: Diharapkan dapat mendorong pendaftaran rumpon.
 - Pelaku Usaha: Bertanggung jawab penuh untuk melakukan pendaftaran mandiri rumpon mereka.
- Kerangka hasil diskusi juknis ada dalam lampiran

Beberapa diskusi yang ditangkap selama kegiatan adalah sebagai berikut :

I. Kebutuhan Modul Pelaporan & Database

- Ibu Putuh dari SILAT menanyakan apakah SILAT dapat menyediakan modul pelaporan rumpon, khususnya berupa database, karena pengembangan mandiri oleh PSI akan sulit.
- Bapak Helmi akan menyampaikan usulan ini kepada Bapak Hamdan.
- Karel menekankan pentingnya bantuan teknis dalam pelaporan dan perlindungan bagi mitra melalui Juknis.

- Pak Charly: data semua rumpon existing dulu. Setelah kita miliki datanya maka lakukan penataan ulang. Ini akan berdampak juga ke perbaikan atau revisi aturan rumpon
- Karel: yang perlu jadi target yang harus ada dalam rencana pendataan pendataan rumpon existing adalah bahwa teknis pendataannya bagaimana, bagaimana data poinnya, platform yang akan dipakai untuk menampung data dari lapangan dan bisa diambil dengan mudah oleh KKP itu seperti apa. Petakan juga seluruh mitra NGO yang sangat memungkinkan untuk ikut membantu KKP dalam mendata rumpon-rumpon eksisting

II. Isu Terkait APBI dan Juknis

- Timur menyarankan agar bantuan APBI (bantuan alat penangkap ikan) selain API (alat penangkapan ikan) seperti rumpon, baik dari daerah maupun pusat, perlu diatur dalam Juknis atau surat edaran. Ini untuk mencegah proliferasi rumponisasi yang berlebihan melalui program pemerintah tanpa pengaturan jelas.

Berikut adalah enam ketentuan yang perlu dipertimbangkan untuk direlaksasi, seperti yang diutarakan oleh Pak Harry. Apakah ini semua diabaikan atau seperti apa :

1. Jarak Antar Rumpon: Penundaan ketentuan jarak antar rumpon.
2. Alokasi Kepmen 7: Penundaan alokasi berdasarkan Keputusan Menteri Nomor 7.
3. Konservasi: Perluasan atau penyesuaian area konservasi.
4. Kewajiban Pelaporan pada SIPR: Bagaimana mengatur kewajiban pelaporan penempatan rumpon yang melekat pada SIPR, serta perpanjangan laporan pemanfaatan rumpon (hasil tangkapan).
5. Jumlah Kepemilikan Rumpon: Batasan kepemilikan maksimal 3 rumpon per kapal.
6. Pemanfaatan Kolektif & Eksklusivitas: Pemanfaatan rumpon secara kolektif, dan eksklusivitas kepemilikan rumpon hanya untuk kapal pemilik (tidak untuk kapal lain).

Kerangka Juknis dan Langkah Awal

- Rifki (Sesditjen) menekankan perlunya pertemuan antara DJPT, PRL, dan PSDKP terkait relaksasi ini.
- Disarankan untuk menerbitkan Surat Edaran terlebih dahulu yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal.
- Penting untuk menghindari kata "penundaan" dalam surat edaran.
- Relaksasi ini dianggap serupa dengan "tax amnesty" dalam hal pentingnya pelaporan.
- Perlu dilakukan simulasi untuk memahami dampak di lapangan dan menuangkannya sebagai rambu-rambu.
- Surat Edaran adalah langkah pertama yang paling penting, diikuti dengan penyusunan Juknis.

Tantangan

Tantangan yang dihadapi dalam diskusi dan pengelolaan rumpon ke depan adalah sebagai berikut :

1. Pelaporan mandiri rumpon yang berfokus pada rumpon yang sudah ada berpotensi memunculkan klaim area palsu dari pelaku usaha. Ini berarti ada kemungkinan pelaku usaha mengklaim telah memasang rumpon di suatu area, padahal belum.
2. Fleksibilitas amnesti rumpon yang akan diberlakukan masih menjadi pertanyaan. Belum jelas apakah amnesti ini akan sepenuhnya terbuka, atau akan ada kriteria dan batasan tertentu, seperti melakukan *overlay* terhadap jalur kapal. Ada juga pertanyaan apakah amnesti ini akan mengabaikan semua ketentuan yang berlaku dalam peraturan rumpon, termasuk jumlah maksimal, titik alokasi, prosedur persyaratan, jarak antar rumpon, dan identitas rumpon.
3. Isu sektoral berpotensi muncul jika amnesti rumpon benar-benar diterapkan. Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (PRL), sebagai pihak yang mengeluarkan izin PKKPRL dan merupakan bagian dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), dikhawatirkan akan mempermudah perizinan rumpon yang merupakan peruntukan perikanan oleh Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT). Hal ini dapat menimbulkan dampak negatif bagi sektor pemanfaatan ruang laut lainnya karena terkesan ada preferensi antarunit di KKP.
4. Draf surat edaran dan draft petunjuk teknis belum dapat dibagikan karena masih dalam tahap sangat awal dan bersifat rahasia. Hal ini dilakukan untuk menghindari kesalahan interpretasi atau pemahaman yang keliru.

Rencana Tindak Lanjut

1. Pengembangan Aplikasi SILAT: PSDI akan mengembangkan formulir pelaporan mandiri rumpon yang sudah ada melalui aplikasi SILAT.
2. Koordinasi Lanjutan Antar Direktorat: Akan diadakan koordinasi lanjutan antara Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT), Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (PRL), dan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) untuk membahas draf surat edaran.

Lampiran

1. Materi Ibu Lingga Dit. KAPI : Petunjuk Teknis Pendaftaran Mekanisme Bantuan Alat Penangkap Ikan (API)
https://drive.google.com/file/d/1xST_HskS3eRWPqFzcoXXELsBjKuzJqn8/view?usp=drive_link
2. Materi dari Aris Budiarto - Ketua Tim Kerja Logbook dan Alokasi Kuota, Dit. PSDI, DJPT : Pola Petunjuk Teknis/Pelaksanaan Terkait Mekanisme Penetapan Nelayan dan Pembagian Kuota Penangkapan Benih Bening Lobster (pueruls) oleh Provinsi Kepada Nelayan
https://drive.google.com/file/d/1P1lvbHLWg-xMPQzVpzosc-kKEI2mhVsl/view?usp=drive_link
3. Diskusi Peyusunan Petunjuk Teknis Pendaftaran Mandiri Rumpon Eksisting Yang diPandu oleh Hary Christianto
https://drive.google.com/file/d/10eOpeVcbL9lweopY_oA1hVukBGAXVAFx/view?usp=drive_link
4. Daftar Hadir
https://drive.google.com/file/d/1p-Pb64l6On2zJZEosztSI01osRGxW7OA/view?usp=drive_link
5. Dokumentasi
<https://drive.google.com/drive/folders/1ZLpRHHoBn52cKz90PhwxqKdnONK5GY3F>



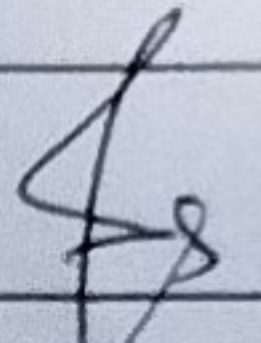
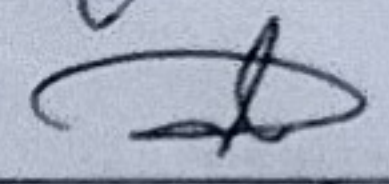
DAFTAR HADIR / ATTENDANCE LIST

TANGGAL & TEMPAT / DATE & VENUE : 18 Juni 2025 / Kopi Tugoh Bogor

NAMA KEGIATAN / EVENT : Meeting Lanjutan Forum Rumpun (Hari Pertama)

Dengan menandatangani daftar hadir di bawah, Saya memberikan hak kepada Yayasan MDPI untuk mengungkap, mengedit, menggunakan dan menggunakan ulang informasi berupa gambar, suara dan nama saya untuk kepentingan pers di setiap dan semua jenis publikasi multi-media, dalam format cetak maupun digital termasuk namun tidak terbatas pada: fotografi, video, rekaman audio, artikel online, siaran berita, publikasi umum lainnya. Dengan ini saya melepaskan hak untuk memeriksa ataupun menyetujui hasil akhir produk, di mana jenis informasi di atas kemungkinan muncul. Saya memahami bahwa tidak ada kompensasi khusus yang akan diberikan kepada saya untuk penggunaan informasi tersebut dan ada kemungkinan di mana saya tidak mendapatkan pemberitahuan awal saat informasi tersebut akan digunakan.

No	Nama/Name	Jenis Kelamin /Gender	Telepon/Phone Number	Email	Institusi/Organization	Tanda Tangan/Signature
1	PURAH SWANELA	P	08125066544	purahswanela@ecup.go.id	ICOP	
2	Mohamad Rife	L	082125890911	m.rifei.64@gmail.com	BAD KUBAN	
3	Hany Christyanti	L			DPSDI	
4	Eka Septina	P	0822 1320 0484	septinaps96@gmail.com	Timja PKP-KAR	
5	Rista Devi Jumar	P	082311427793		KAPI DH-PSDI	
6	Lingga r	P			KAPI	
7	Putra Sahria Timur	L	0811 3976 399	timur@mdpi.or.id	MDPI	
8	Karel Jensa	L	085361603778		MDPI	

9	Suziswati	P	087888836204	sdi.djnr@yahoo.com	1207-2021	
10	Nur Fatmawati	P	0823 3502 0773		1706-2017	



DAFTAR HADIR / ATTENDANCE LIST

TANGGAL & TEMPAT / DATE & VENUE :

NAMA KEGIATAN / EVENT :

Dengan menandatangani daftar hadir di bawah, Saya memberikan hak kepada Yayasan MDPI untuk mengungkap, mengedit, menggunakan dan menggunakan ulang informasi berupa gambar, suara dan nama saya untuk kepentingan pers di setiap dan semua jenis publikasi multi-media, dalam format cetak maupun digital termasuk namun tidak terbatas pada: fotografi, video, rekaman audio, artikel online, siaran berita, publikasi umum lainnya. Dengan ini saya melepaskan hak untuk memeriksa ataupun menyetujui hasil akhir produk, di mana jenis informasi di atas kemungkinan muncul. Saya memahami bahwa tidak ada kompensasi khusus yang akan diberikan kepada saya untuk penggunaan informasi tersebut dan ada kemungkinan di mana saya tidak mendapatkan pemberitahuan awal saat informasi tersebut akan digunakan.

No	Nama/Name	Jenis Kelamin /Gender	Telepon/Phone Number	Email	Institusi/Organization	Tanda Tangan/Signature
1	Vrd = Wulandari	P.	085375352792	Vrd..wulandari92@gmail.com	KKP	
2	Moh. Ichilmi	L	08562922622	m.ichilmi@gmail.com	KKP	
3	Nenny	P	089651425721		KKP	
4	Hhyyer	P			KKP	
5						
6						
7						
8						



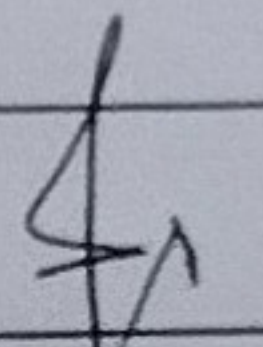
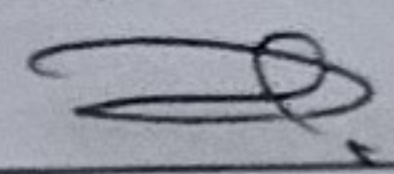
DAFTAR HADIR / ATTENDANCE LIST

TANGGAL & TEMPAT / DATE & VENUE : 19 Juni 2025 / Kopi Tugoh Bogor

NAMA KEGIATAN / EVENT : Meeting Lanjutan Forum Rumpun (Hari Kedua)

Dengan menandatangani daftar hadir di bawah, Saya memberikan hak kepada Yayasan MDPI untuk mengungkap, mengedit, menggunakan dan menggunakan ulang informasi berupa gambar, suara dan nama saya untuk kepentingan pers di setiap dan semua jenis publikasi multi-media, dalam format cetak maupun digital termasuk namun tidak terbatas pada: fotografi, video, rekaman audio, artikel online, siaran berita, publikasi umum lainnya. Dengan ini saya melepaskan hak untuk memeriksa ataupun menyetujui hasil akhir produk, di mana jenis informasi di atas kemungkinan muncul. Saya memahami bahwa tidak ada kompensasi khusus yang akan diberikan kepada saya untuk penggunaan informasi tersebut dan ada kemungkinan di mana saya tidak mendapatkan pemberitahuan awal saat informasi tersebut akan digunakan.

No	Nama/Name	Jenis Kelamin / Gender	Telepon/Phone Number	Email	Institusi/Organization	Tanda Tangan/Signature
1	RUTH SUAREZA	P	08128806654	ruthsuareza@cupso.id	KCP	
2	Mohamad Hiji	L	082125840911	m.rifki.bho@gmail.com	Biro Hubun	
3	Eka Septera	P	082213200484	septianapsa@gmail.com	Timpa Pokp - KAP	
4	Rista Devi Juniar	P	082311427793	devikkp17@gmail.com	Dit-PSDI	
5	Karel Jenuk	L	085361663778		MUPI	
6	Faran Setra Timur	L	0815976399	timur@mdpi.or.id	MDPI	
7	Lingga P	P	081381505881	linggarawita@yahoo.com	KAPI	
8	Harry Christijanto	L	08151168	sh-djpt.exmu	DPDI	

9	Satriantih	P	085888360264	sdi-dyp+@yahoo.com	Dit 2022	
10	Nur Fatmawati	P	0823 3582078		Hukum DPT	



DAFTAR HADIR / ATTENDANCE LIST

TANGGAL & TEMPAT / DATE & VENUE : 19/06/2025

NAMA KEGIATAN / EVENT :

Dengan menandatangani daftar hadir di bawah, Saya memberikan hak kepada Yayasan MDPI untuk mengungkap, mengedit, menggunakan dan menggunakan ulang informasi berupa gambar, suara dan nama saya untuk kepentingan pers di setiap dan semua jenis publikasi multi-media, dalam format cetak maupun digital termasuk namun tidak terbatas pada: fotografi, video, rekaman audio, artikel online, siaran berita, publikasi umum lainnya. Dengan ini saya melepaskan hak untuk memeriksa ataupun menyetujui hasil akhir produk, di mana jenis informasi di atas kemungkinan muncul. Saya memahami bahwa tidak ada kompensasi khusus yang akan diberikan kepada saya untuk penggunaan informasi tersebut dan ada kemungkinan di mana saya tidak mendapatkan pemberitahuan awal saat informasi tersebut akan digunakan.

No	Nama/Name	Jenis Kelamin /Gender	Telepon/Phone Number	Email	Institusi/Organization	Tanda Tangan/Signature
1	Ninda Melanda	P	08539232752	Ninda.melanda32@gmail.com	KKP	
2	Neneng	P	089651425721	neneng.al30@gmail.com	KKP	
3	Hansen	P	08137771225	hansen.g.c.s@gmail.com	KKP	
4	Moh. Khilmi	L	08962922672	m.khilmi@gmail.com	KKP	
5	Rianna Handayani	P	0811499422	daya135@yahoo.co.id	KKP	
6						
7						
8						